

## Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire

**Ilham Nurfaizi Kurniawan**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: Nurfaizikilham@gmail.com

**Benny Irawan**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: benny.irawan@untirta.ac.id

**Rena Yulia**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: rena.yulia@gmail.com

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12053>

---

### Info Artikel

| **Submitted:** 01 Agustus 2021 | **Revised:** 09 November 2021 | **Accepted:** 22 November 2021

How to cite: Ilham Nurfaizi Kurniawan, Benny Irawan, Rena Yulia, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire*”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 24-34.

---

### ABSTRAK

*The spread of hoaxes in Indonesia is currently increasingly widespread and is often carried out by the Indonesian people to make others believe in an event and an information that does not have actual facts, with the circulation of this hoax news will be bad for the development of the State of Indonesia in the future. This study is to find out what factors cause the occurrence of the crime of spreading hoaxes in the Sunda Empire case and what efforts need to be made to prevent the crime of hoaxes in the Sunda Empire. The research method used is the normative juridical method, namely by examining library legal materials or secondary data, namely data that refers to legal norms in laws and regulations, legal theories and court decisions which are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that what factors lead to the emergence of the crime of spreading hoaxes in the Sunda Empire case in a criminological perspective due to the ego aspect which is more inclined to the id aspect so that the superego aspect is weak and unable to balance the mind in tackling inner conflicts that occur so that make the crime of spreading the Sunda Empire hoax. if not immediately prevented, it will cause more victims to be affected than.*

**Keywords:** Hoax Spread Crime, Criminology.

### **ABSTRAK**

Penyebaran *hoax* di Indonesia saat ini kian marak dan sering kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk membuat orang lain mempercayai terhadap suatu kejadian dan suatu informasi yang belum mempunyai fakta sebenarnya, dengan beredarnya berita *hoax* ini akan berakibat buruk bagi perkembangan Negara Indonesia kedepannya. Penelitian ini untuk mengetahui Faktor - Faktor Apa Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire dan Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah tindak pidana Hoax Sunda Empire. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder yaitu data - data yang mengacu kepada norma hukum dalam peraturan perundang - undangan, teori - teori hukum dan keputusan pengadilan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor - Faktor Apa Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire Dalam Perspektif Kriminologi dikarenakan aspek *ego* yang lebih condong kepada aspek *Id* sehingga aspek *Superego* lemah serta tidak mampu menjadi penyeimbang pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi sehingga membuat terjadinya tindak pidana penyebaran *hoax* Sunda Empire. apabila tidak segera dicegah akan menyebabkan banyaknya korban yang terkena dampak.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Penyebaran Hoax, Kriminologi.*

## Pendahuluan

*Hoax* di Indonesia saat ini sangat marak dan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk membuat orang lain mempercayai terhadap suatu kejadian. Adapun Kata *hoax* berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah Bahasa latin "*hoc est corpus*" artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar.

Dalam penyebaran berita *hoax* ini memiliki tujuan utama yaitu untuk membohongi publik, dan membuat kegaduhan sehingga ada sebuah keuntungan yang didapat oleh si penyebar *hoax* ini dengan memberikan pengaruh baru yang muncul di masyarakat sesuai dengan keinginan si pembuat berita tersebut. Penyebaran *hoax* ini sejatinya sangat merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Pada awal tahun 2020 Negara Indonesia dihebohkan dengan kemunculan kerajaan baru yang secara tiba-tiba hadir dan deklarasi dihadapan masyarakat yang menyatakan bahwa kerajaan tersebut merupakan penguasa dunia nama kerajaan tersebut adalah Sunda Empire yang merupakan satu bentuk Kekaisaran Matahari.

Kerajaan Sunda Empire ini di Bandung, Jawa Barat yang memiliki petinggi yang terdiri dari tiga orang yaitu Nasri Banks sebagai Perdana Menteri, Raden Ratna Ningrum sebagai Kaisar dan Ki Ageng Rangga Sasana Sebagai Sekertaris Jendral. Kemunculan Kerajaan Sunda Empire ini bermula ketika beredarnya sebuah video yang diunggah oleh pemilik akun media sosial yang di mana dalam video

tersebut Nasri Banks, Raden Ratna Ningrum dan Ki Ageng Rangga Sasana mengatakan bahwa Sunda Empire ini memiliki enam wilayah kekuasaan antara lain : Sunda Atlantik yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Lalu Sunda Nusantara, Sunda Eropa, Sunda Pasifik, Sunda Achipelago dan Sunda Mainland.<sup>2</sup>

Ki Ageng Rangga Sasana pada saat diundang di acara ILC (*Indonesia Lawyers Club*) mengatakan bahwa Sunda Empire ini sudah ada sejak *Alexander The Great* dan memiliki pemerintahan penguasa dunia yang bernama De Heren XVII itu lahir setelah perang dunia kedua berakhir. Rangga Sasana pun menegaskan bahwa PBB (perserikatan Bangsa - Bangsa) dan Pentagon lahir di Bandung.<sup>3</sup>

Sunda Empire merupakan sebuah perkumpulan yang mengklaim dirinya sebagai Kekaisaran Matahari, di dalam sebuah video yang beredar seorang pria yang bernama Rangga Sasana Sekertaris Jendral Nusantara menyebutkan bahwa dunia akan berakhir dan mengatakan bahwa Bandung sebagai korp diplomatik serta seluruh negara di dunia wajib mendaftar ulang ke kerajaan Sunda Empire pada tanggal 15 Agustus 2020 jika tidak negara di dunia akan bubar.<sup>4</sup>

Perbuatan petinggi Sunda Empire ini dijerat dengan pasal 14 ayat (1)

---

<sup>2</sup> Dony Indra Ramadhan, "Halusinasi Sunda Empire," *news.detik.com*, 2020, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20200119/Halusinasi-Sunda-Empire/>.

<sup>3</sup> Frandi Piring, "Asal Usul Sunda Empire, Petinggi Ceritakan Sejarahnya, Roy Suryo Sumringah: Kacau, Ini Halusinasi," *manado.tribunnews.com*, 2020, <https://manado.tribunnews.com/2020/01/23/asal-usul-sunda-empire-petinggi-ceritakan-sejarahnya-roy-suryo-sumringah-kacau-ini-halusinasi?page=all>.

<sup>4</sup> Devira Prastiwi, "7 Hal Terkait Kemunculan Sunda Empire yang Hebohkan Jagat Maya," *liputan6.com*, 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya>.

---

<sup>1</sup> Muhmad Ahmad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam," *Jurnal Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v3i1.677>.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kasus - kasus semacam ini berdampak buruk terhadap psikologi masyarakat, politik, dan ketentraman Negara Indonesia karena efek yang ditimbulkan dari kasus - kasus penyebaran *hoax* ini.

Fenomena kemunculan kerajaan fiktif diatas itu biasanya dimunculkan oleh orang - orang yang mengalami *delusi* keagungan (*grandiose delusion*) keberhasilan para penggagas kerajaan fiktif itu berhasil menggaet pengikut karena didukung dengan perasaan psikologi massa sehingga mampu mempengaruhi dan meyakinkan pengikutnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penulis tertarik untuk meneliti permasalahan kasus tersebut mengenai : Faktor - Faktor Apa Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penyebaran *Hoax* Kasus Sunda Empire dan Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah tindak pidana *Hoax* Sunda Empire

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yaitu dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan ini.<sup>6</sup> Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-

undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>8</sup>

### Pembahasan

#### 1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penyebaran *Hoax* Kasus Sunda Empire Dalam Perpektif Kriminologi

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Penyebaran *hoax* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang pada akhir - akhir ini sering terjadi dan ramai diberitakan melalui koran, majalah, televisi maupun media massa lainnya. Pada bulan Januari tahun 2020 Negara Indonesia kembali dihebohkan dengan kemunculan suatu kerajaan fiktif yaitu Kerajaan Sunda Empire yang berada di Bandung yang pada akhirnya disebar luaskan oleh para petinggi kerajaan tersebut.

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, dari berbagai informasi yang didapatkan salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung, buku, internet dan jurnal terkait kasus Sunda Empire ini, penulis melihat adanya suatu tindak pidana penyebaran *hoax* tentang Kerajaan Sunda Empire yang dilakukan oleh ketiga petinggi

<sup>5</sup> Restu Diantina Putri, "Akhir Perjalanan Delusi Kekuasaan Sunda Empire," *tirto.id*, 2020, <https://tirto.id/akhir-perjalanan-delusi-kekuasaan-sunda-empire-evEV>.

<sup>6</sup> Rani Sri Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005). Hlm. 52.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007). Hlm. 13.

yakni Nasri Banks, Raden Ratna Ningrum dan Ki Ageng Rangga Sasana. Dalam setiap tindak pidana yang dilakukan tentunya manusia tidak akan pernah lepas dari faktor psikologis yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori psikoanalisa yaitu teori yang menyatakan keadaan - keadaan kelemahan hati nurani si pelaku yang akhirnya menimbulkan tindak kejahatan akibat si pelaku tidak dapat menahan dorongan - dorongan atau konflik batin yang terjadi dalam dirinya sehingga tidak memperdulikan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dengan cara legal maupun illegal.

Menurut analisis penulis atas kasus Sunda Empire tersebut, dalam kasus Sunda Empire penulis melihat adanya sebuah kesimpangan kepribadian yang dimiliki oleh Nasri Banks, Raden Ratna Ningrum dan Ki Ageng Rangga Sasana sehingga mereka tergabung dalam satu wilayah yaitu Sunda Empire. Penyimpangan kepribadian yang dialami oleh ketiga orang tersebut dilatar belakangi oleh faktor delusi dan halusinasi yang berlebih yang ditimbulkan karena mereka membaca sejarah yang entah asalnya dari mana serta faktor pendukung lain yang dalam pikirannya yaitu karena ingin memulangkan anaknya yang tertahan di Malaysia.

Menurut analisis penulis, dengan menggunakan teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang dimana menurutnya setidaknya ada 3 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yaitu aspek *Id* (aspek biologis), *Ego* (aspek psikologis) dan *Superego* (aspek Sosiologis).

Aspek *Id* adalah perbuatan manusia yang mengarah pada hal - hal yang negatif, dimana manusia hanya memikirkan kesenangannya dirinya tanpa melihat apakah perbuatannya

melanggar hukum atau tidak. Aspek *Id* para terdakwa dalam kasus Sunda Empire ini, dapat terlihat ketika para pelaku ini menyebarkan *hoax* Kerajaan Sunda Empire dikarenakan faktor delusi, faktor halusinasi dan faktor ingin memulangkan anaknya yang tertahan di Malaysia karena menggunakan passport palsu Sunda Empire. Dilatar belakangi oleh ketiga faktor yang bergejolak dalam dirinya maka terjadilah konflik batin tersebut maka atas dasar itulah pelaku tidak lagi memikirkan apakah tindakan yang dilakukan itu akan diterima masyarakat atau tidak serta melanggar aturan hukum atau tidak.

Aspek *superego* ini adalah bagian dari pada perbuatan manusia yang mengarah kepada hal - hal yang positif berkaitan dengan hati nurani, melihat pada kasus Sunda Empire ini aspek *superego* terdakwa yaitu ketika para terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Kerajaan Sunda Empire bukan merupakan bagian dari sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah Indonesia, karena memang faktanya tidak pernah ada, akan tetapi pada setiap acara pertemuan di Gedung Isola Bandung para terdakwa selalu menyampaikan materi tentang kerajaan Sunda Empire yang dapat merubah tatanan dunia. Pada saat itulah aspek *Superego* terdakwa lemah karena pelaku tidak mampu menahan atau menjadi penyeimbang dari pikiran yang ditimbulkan oleh aspek *Id* yang mengarah hal - hal yang bersifat menyimpang dari moralitas masyarakat dan kenyataan sejarah dunia maupun Indonesia.

Dalam hal ini aspek *Ego* hanya menjadi penengah penentu kebijakan atau bisa disebut dengan eksekutor antara *Id* dan *Superego*. *Ego* yang mengontrol *Id* dan *Superego* jika *Ego* ini menentukan kebijakannya seimbang maka akan tercipta keselarasan dan keharmonisan. Namun, jika *Ego* ini bergerak terlalu banyak dipengaruhi oleh *Id* maka pada akhirnya akan terjadi

kejanggalan dalam berperilaku dan kesadarannya tidak akan teratur dengan baik.

Terjadinya tindak pidana penyebaran *hoax* Sunda Empire karena didasarkan oleh aspek *Ego* yang lebih condong kepada aspek *Id* dan aspek *superego* yang lemah dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi dalam teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud maka terjadilah tindak pidana penyebaran *hoax* Sunda Empire ini.

Dalam kasus Sunda Empire ini, terdakwa mendirikan kerajaan karena mampu mempersuasikan seseorang. Artinya, mereka melakukan gerakan secara berulang-ulang untuk meyakinkan masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan yang sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Seakan-akan kerajaan yang mereka bangun ini berguna dan bermanfaat bagi orang lain, seperti status sosial berubah, bertambahnya ekonomi dan lain sebagainya.

Peran pelaku dalam upaya meyakinkan masyarakat dan upaya menghilangkan kecemasan tersebut, menurut teori yang dikemukakan Sigmund Freud yang menjelaskan lebih lanjut bahwa kecemasan yang telah disebutkan sebelumnya, terbentuk karena adanya konflik antara *Id* dan *Superego*. Kecemasan ini kemudian berperan sebagai sinyal bahaya bagi *ego* agar dapat bertindak.<sup>9</sup> Apabila *ego* tidak dapat menanggulangi kecemasan dengan cara - cara rasional, maka *ego* akan menggunakan cara - cara yang tidak realistis yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*). Mekanisme pertahanan diri ini dikatakan tidak realistis karena *ego*

akan memalsukan, menyangkal, atau mendistorsi/merusak realitas.<sup>10</sup>

Teori Freud secara gamblang menjelaskan tentang mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) sebagai bentuk dari ketidaksadaran individu dalam menghadapi realita. Jika konselor memakai konsep teori Freud maka seorang konselor dituntut untuk memahami bentuk - bentuk pertahanan diri yang sering dilakukan seseorang. Secara singkat bentuk - bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu :<sup>11</sup>

a. Represi

Didefinisikan sebagai upaya individu untuk menghilangkan frustrasi, konflik batin dan bentuk - bentuk kecemasan lain yang ada dalam dirinya. Pada kasus ini ketiga terdakwa mendirikan Sunda Empire adalah bagian dari pada upaya untuk menghilangkan frustrasi, konflik batin dan kecemasan ketika kedua anaknya ditahan di Malaysia. Itu terjadi karena mereka tidak tau cara menyelesaikan dan tidak bersedia menceritakan permasalahan kecemasan tersebut.

b. Denial

Pada proposisi yang kedua bahwa si pelaku selalu menyangkal kenyataan yang terjadi yang tidak menyenangkan dirinya, itu terlihat dari cara mereka menolak kenyataan bahwa Sunda Empire itu tidak ada.

c. Proyeksi

Konseli melakukan proyeksi dengan mengalihkan perbuatan tidak menyenangkan atau kekeliruan kepada orang lain. Berkaca pada kasus Sunda Empire para pelaku ini selalu menyalahkan fakta sejarah yang terjadi

---

<sup>9</sup> Daniel Cervone dan Oliver P. John Lawrence A. Pervin, *Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian Edisi Kesembilan* (Pranada Media, 2021). Hlm. 34.

---

<sup>10</sup> Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, *Teori - Teori Holistik Psikologi Kepribadian 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2017). Hlm. 22.

<sup>11</sup> Sigit Sanyata, "MEKANISME DAN TAKTIK BERTAHAN: PENOLAKAN REALITA DALAM KONSELING," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta* 4, no. 8 (2009): 37-38, <https://journal.uny.ac.id/index.php/paradigma/article/view/5933>.

agar kerajaan Sunda Empire ini dianggap benar – benar ada.

d. Rasionalisasi

Kasus Sunda Empire ini selalu mencoba merasionalkan serta mencari – cari alasan agar apa yang dia ucapkan dan agar kerajaan yang mereka bentuk itu dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, terbukti dengan dia mengatakan bahwa PBB (perserikatan bangsa – bangsa dan Pentagon itu lahir di kota Bandung serta mereka memiliki 6 wilayah di benua antartika, melihat dari pada itu jelas itu adalah suatu bentuk dan upaya merasionalkan bahwa kerajaan Sunda Empire itu benar ada.

e. Intelektualisasi

Intelektualisasi ini merupakan upaya seseorang untuk menghadapi situasi yang menekan perasaannya dengan jalan analitik dan intelektual. Dengan melihat pada kasus Sunda Empire ini si pelaku melakukan pertahanan dirinya dengan jalan analitik dan intelektual yang dimana dalam penyampaian tentang kerajaan Sunda Empire kepada masyarakat si pelaku menggunakan bahasa dan gaya bicara layaknya orang yang memiliki intelektual dan analitik yang sangat hebat sehingga membuat orang awam yakin dengan adanya kerajaan Sunda Empire tersebut.

f. Pembentukan reaksi

Pembentukan reaksi ini memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari gangguan perasaan atau keinginan dengan mengumpamakan kebalikan dari kejadian tersebut. Dalam kasus Sunda Empire ini para pelaku melakukan pembentukan reaksi terlihat dari mimik wajah yang tenang, ucapannya yang lantang seolah – olah meyakinkan, serta menunjukan gestur tubuh yang membuat orang agar percaya pada saat menyampaikan kebenaran adanya Sunda Empire, itu semua mereka dilakukan agar menutupi seolah-olah

memang kerajaan Sunda Empire ini benar adanya.

g. Introyeksi

Introyeksi ini terjadi ketika seseorang memperoleh pendapat atau nilai – nilai orang lain, walaupun bertentangan dengan sikap atau prinsip yang dipegangnya. Pada kasus Sunda Empire para pelaku ini melakukan bentuk introyeksi dengan cara menerima semua pendapat yang bertentangan namun ia tidak memberikan tanggapan atas apa yang disarankan dan diargumentasikan oleh pihak luar yang tidak sependapat dengan mereka.

Teori *Defense Mechanism* diatas memaparkan sedemikian rupa tentang pertahanan diri yang selalu dilakukan oleh setiap individu, dalam hal ini adalah kasus Kerajaan Sunda Empire yang dimana Rangga Sasana yang merepresentasikan dari kerajaan Sunda Empire selalu menampilkan dalam bentuk rasionalisasi ataupun gaya bicara yang persuasi untuk menutupi dan mempertahankan argumentasi yang telah diutarakan sebelumnya di beberapa forum-forum diskusi untuk mendapatkan empati dari masyarakat.

Oleh karena faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran *hoax* Sunda Empire ini dikarenakan faktor *ego* yang lebih condong kepada aspek *Id* dan aspek *superego* lemah serta tidak mampu menjadi penyeimbang pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi. Kegagalan aspek *superego* tersebut yang menyebabkan aspek *ego* lebih dominan kepada aspek *Id*. Faktor tersebut yang akhirnya menyebabkan timbulnya kecemasan dalam diri dari setiap pelaku karena kecemasan itulah maka pelaku melakukan pertahanan diri (*defence mechanism*) dan ini bagian dari pada upaya meyakinkan masyarakat bahwa Sunda Empire ada.

## 2. Upaya untuk pencegahan tindak pidana penyebaran hoax sunda empire

Tindak Pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya, dirasakan sangat meresahkan disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Ide utama dibelakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial.

Dalam konteks ini, Travis Hirschi mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu:<sup>12</sup>

- a. Segala bentuk pengingkaran terhadap bentuk aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada;
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur;
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan ataupun criminal; dan
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Menurut AKP Syahroni selaku anggota Penyidik Polda Jawa Barat, cara untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana Penyebaran hoax ini adalah dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat yang melibatkan beberapa pihak seperti dinas sosial, dinas kesehatan, serta tokoh-tokoh agama maupun masyarakat yang ada di wilayah Polda Jawa Barat ini. Selain

daripada itu juga pemerintah daerah harus membuat kegiatan rutin untuk meningkatkan nilai-nilai religious dan pendidikan non formal untuk masyarakat yang berada di daerah yang ada di daerah hukum Polda Jawa Barat ini sebagai upaya pencegahan preventif agar tidak terjadi kembali tindak pidana penyebaran hoax sunda empire ini.<sup>13</sup>

Travis Hirschi memetakan empat unsur utama didalam kontrol sosial yang terkandung dalam proposisinya, yaitu keterikatan (attachment), keterlibatan (involvement), tanggung jawab/pendirian kuat yang positif (commitment), kepercayaan (belief). 1. Attachment diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. 2. Involvement, berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam pekerjaan. 3. Commitment, diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta 4. Belief, merupakan unsur yang menwujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.<sup>14</sup>

Dalam hal pencegahan tindak pidana Penyebaran Hoax Sunda Empire ini harus adanya sinergitas antara beberapa pihak yang berada di sekitar pelaku kejadian tindak pidana penyebaran hoax tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Travis Hirschi

---

<sup>12</sup> "Aletheia Rabbani, Travis Hirschi, Social Bond Theory (Teori Kontrol Sosial)," n.d., <https://smansacibeber.wordpress.com/2017/11/travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html>.

<sup>13</sup> "Wawancara dengan AKP Syahroni, Kepala Penyidik Polda Jawa Barat," n.d.

<sup>14</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). Hlm. 73.



terjadinya tindak pidana disebabkan karena lemahnya kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga negara dan juga lingkungan sekitar, lemahnya kontrol sosial di sebabkan beberapa indikator yang terjadi di lingkungan sekitar, mulai dari pada kondisi demografis yang heterogen sehingga mengurangi nilai-nilai rasa keterikatan dan kepedulian antar satu sama lain di sekitar tempat terjadinya penyebaran hoax tersebut. Untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana penyebaran hoax sunda empire kembali di Bandung tersebut, Pemerintah Bandung harus cepat dan tanggap karena kejadian ini baru pertama kalinya terjadi, dengan cara mengadakan edukasi tentang wawasan kebangsaan untuk menanam nilai-nilai nasionalisme masyarakat.

Selain dari pada pemerintah Bandung yang melakukan antisipasi untuk sekitar Bandung, instansi-intansi yang terkait seperti Polda Jawa Barat dan juga dinas sosial juga harus melakukan tindakan-tindakan preventif berupa pencerdasan kepada masyarakat daerah Bandung salah satunya adalah dengan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang oleh peradilan, misalnya tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik pengertian sebagai berikut: 1. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. 2. Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara. 3. Pencapaiannya kadar kesadaran hukum yang tinggi adalah dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup>

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.<sup>16</sup> Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Oleh karena itu dengan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi untuk mencegah terjadinya tindak pidana disebutkan dalam salah satu proposisinya adalah *commitment* atau pendirian positif yang kuat agar tertanamnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat secara sustainable.

## Penutup

Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran *hoax* Sunda Empire ini dikarenakan aspek *ego* yang lebih condong kepada aspek *Id* yang dilatar belakangi oleh faktor delusi, faktor halusinasi dan faktor ingin memulangkan anaknya yang tertahan di Malaysia dan aspek *superego* para terdakwa yaitu mengetahui secara sadar

<sup>15</sup> Sabar Slamet, *Hukum Pidana* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998). Hlm. 106.

<sup>16</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 510.

bahwa Kerajaan Sunda Empire itu tidak ada. Pada saat itulah aspek *Superego* lemah serta tidak mampu menjadi penyeimbang pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi sehingga membuat terjadinya tindak pidana penyebaran *hoax* Sunda Empire. Faktor tersebut yang akhirnya menyebabkan timbulnya kecemasan dalam diri dari setiap pelaku karena kecemasan itulah maka pelaku melakukan pertahanan diri (*defence mechanism*) dan ini bagian dari pada upaya meyakinkan masyarakat bahwa Sunda Empire ada.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyebaran *hoax* *sunda empire* ini, pihak-pihak yang terlibat dalam kerajaan *sunda empire* seharusnya mengadakan sosialisasi rutin untuk masyarakat perdesaan yang masih rendah tingkat pendidikannya dan tingkat pengetahuannya serta harus bekerjasama dengan pihak kepolisian sebagai penanggung jawab masyarakat serta pemerintah desa yang berada dekat dengan masyarakat desa.

#### Daftar Pustaka

- A. S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.
- "Aletheia Rabbani, Travis Hirschi, Social Bond Theory (Teori Kontrol Sosial)," n.d. <https://smansacibeber.wordpress.com/2017/11/travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html>.
- Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey. *Teori - Teori Holistik Psikologi Kepribadian 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2005.
- Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone dan Oliver P. John. *Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian Edisi Kesembilan*. Pranada Media, 2021.
- Nasution, Muhmad Ahmad. "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam." *Jurnal Yurisprudentia Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v3i1.677>.
- Piring, Frandi. "Asal Usul Sunda Empire, Petinggi Ceritakan Sejarahnya, Roy Suryo Sumringah: Kacau, Ini Halusinasi." *manado.tribunnews.com*, 2020. <https://manado.tribunnews.com/2020/01/23/asal-usul-sunda-empire-petinggi-ceritakan-sejarahnya-roy-suryo-sumringah-kacau-ini-halusinasi?page=all>.
- Prastiwi, Devira. "7 Hal Terkait Kemunculan Sunda Empire yang Hebohkan Jagat Maya." *liputan6.com*, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya>.
- Putri, Restu Diantina. "Akhir Perjalanan Delusi Kekuasaan Sunda Empire." *tirto.id*, 2020. <https://tirto.id/akhir-perjalanan-delusi-kekuasaan-sunda-empire-evEV>.
- Ramadhan, Dony Indra. "Halusinasi Sunda Empire." *news.detik.com*, 2020. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20200119/Halusinasi-Sunda-Empire/>.

Sanyata, Sigit. "MEKANISME DAN TAKTIK BERTAHAN: PENOLAKAN REALITA DALAM KONSELING." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta* 4, no. 8 (2009): 37-38. <https://journal.uny.ac.id/index.php/paradigma/article/view/5933>.  
Slamet, Sabar. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.  
"Wawancara dengan AKP Syahroni, Kepala Penyidik Polda Jawa Barat," n.d.